

Tujuh Direktur Tanah Soedarso Belum Tuntas

PONTIANAK - Aset tanah Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso termasuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat TTA Nyarong mengungkapkan, banyak tanah rumah sakit tersebut yang harus ditertibkan.

"Ada rekomendasi BPK terhadap temuan aset. Saya sudah baca semua rekomendasi temuan

BPK. Kami selaku institusi yang diberi kewenangan tetap melakukan pertertiban.

Tetapi berkoordinasi dulu dengan instansi terkait. Temuan ini juga aset tanah, termasuk tanah di RSUD Soedarso," ujar Nyarong, kemarin.

Menurut Nyarong, tanah milik Pemprov yang berada di sekitar RSUD Soedarso tersebut bisa di bawah pengelolaan rumah sakit, tetapi ada juga di bawah Dinas Kesehatan Kalbar. Untuk penertiban, pihaknya sedang melakukan inventarisasi dan tetap melakukan diskusi dengan instansi terkait.

"Tanah ini tak hanya di sekitar RSUD Soedarso, melainkan juga tersebar di seluruh Kalbar. Kondisi tanah ada yang belum memiliki sertifikat, ada yang didiami oleh warga. Kami sedang melakukan inventarisasi dan monitoring," ungkap Nyarong.



METROHARIINI

Tujuh Direktur Tanah Soedarso Belum Tuntas

Sambungan dari halaman 9

Direktur RSUD Soedarso Pontianak Gede Sandjaja mengatakan, luas tanah RSUD Soedarso mencapai 25,6 hektar. Dari total luas seluruhnya, sekitar 20 sampai 30 persen bermasalah. Ada belum memiliki sertifikat, ada yang memiliki sertifikat ganda, maupun ada yang dibangun gubuk-gubuk liar oleh warga. "Ada yang sampai ke pengadilan," ujar Gede.

Gede mengaku sangat susah mengurus aset tanah tersebut. Bahkan persoalan aset tanah ini terbengkalai sejak direktur-direktur rumah sakit sebelumnya. "Saya ini Direktur yang ketujuh. Kondisinya, ada yang sampai ke Mahkamah Agung. Memang sangat susah mengurus tanah ini. Ini permainan dengan BPN, sertifikat bisa ganda," ungkap Gede.

Gedemenambahkan Direktur RSUD Soedarso tidak mampu sendirian menyelesaikan persoalan aset tanah. Harus ada kebijakan dewan, gubernur, hingga petinggi daerah lainnya.

"Itu tanah Soedarso. Ada sebagian bangunan milik Dinas Kesehatan. Dulu *kan* menjadi satu, sekarang terpisah," kata Gede yang berharap ada pengalihan aset dari Dinas Kesehatan kepada RSUD Soedarso agar pihaknya bisa berbenah.

Terkait Pansus Aset, Jajaran eksekutif dan legislatif diminta tidak perlu takut akan wacana pembentukan Panitia Khusus

DPRD tentang Aset. Salah seorang pengusul Pansus Aset, Retno Pramudya mengatakan, persoalan aset ini cukup kompleks dan rumit sehingga harus ditangani secara lebih fokus melalui Pansus. Jika tanpa Pansus, ia pesimistis masalah aset akan dapat dituntaskan.

Hasil Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan tujuan tertentu tentang aset yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu jelas menunjukkan bahwa masih banyak persoalan tentang aset di lingkungan Pemprov. "Aset sampai hari ini sangat bermasalah. Kalau tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan banyak yang hilang dan akan sangat merugikan daerah," katanya kemarin.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian menurutnya juga memperjelas bahwa aset di Pemprov Kalbar bermasalah dan perlu ditangani. "Rakyat akan semakin curiga kalau eksekutif maupun DPRD berkeras menolak usulan segera dibentuknya Pansus DPRD. Jangankan mau menerima usul anggota, mendengarkan usulannya saja tidak mau, luar biasa ketakutannya," ujar politisi PPP itu.

Ia menilai penolakan Pansus Aset adalah suatu hal yang aneh. Apalagi penolakan itu muncul sebelum usul disampaikan secara formal melalui sidang paripurna. "Aneh! Belum men-

dengarkan apa substansi usul dari para pengusul, Pansus Aset sudah ditolak ramai-ramai. Ada apa? Usul Pansus Aset dan PKR seperti hantu yang menakutkan banyak pihak," tambahnya.

Beberapa anggota DPRD Kalbar sebetulnya sudah mengusulkan pembentukan Pansus Aset sejak Pebruari tahun lalu. Tetapi, kata Retno, usul itu tidak pernah diindahkan dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD. "Baru sekarang berdalih usul tersebut dikait-kaitkan dengan pilkada. Padahal, keinginan teman-teman hanyalah meminta ruang agar persoalan aset ini dibahas dan didiskusikan," katanya. Ia juga menyebutkan, sejak tahun lalu Anggota BPK, Rizal Djilil sudah menyarankan agar Pemprov segera menyelesaikan semua persoalan aset jika Kalbar ingin meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ketika itu upaya penyelesaian disarankan dengan membentuk Pansus atau Panja.

Retno juga menyesalkan pernyataan gubernur dan sekretaris daerah sebagaimana yang diberitakan kemarin. Sebab, dari isi pernyataan tersebut, terkesan keduanya ingin lepas tangan dan menyalahkan satuan kerja perangkat daerah. Padahal, undang-undang sudah jelas menentukan bahwa mereka adalah penanggung jawab penuh atas penataan dan pengelolaan seluruh aset milik Pemprov. (*uni/ron*)